

BPK TURUN TANGAN PERIKSA TEMUAN KELEBIHAN BELANJA RP193 MILIAR DI RSUD NTB



GEDUNG LAYANAN RSUD PROVINSI NTB DI JALAN PRABU RANGKASARI, DASAN CERMEN, KECAMATAN SANDUBAYA, KOTA MATARAM. FOTO: MUHAMMAD YAMIN

Mataram (NTBSatu) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB, turun tangan mengaudit temuan kelebihan belanja 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB.

Sebelumnya, terdapat temuan kelebihan belanja tahun 2024 di RSUD Provinsi NTB yang rencana akan ditutup dengan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sekitar Rp193 miliar.

“Ini BPK mau audit, khusus RSUD NTB itu ada Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dari BPK,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, Ervan Anwar, Senin, 17 Februari 2025.

Pemeriksaan mulai hari ini. Untuk tahap entry meeting atau pemeriksaan pendahuluan membutuhkan waktu selama 38 hari.

Ervan menyampaikan, pemeriksaan tak hanya di RSUD Provinsi NTB. Tapi, BPK juga melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) untuk semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB tahun anggaran 2024.

“Khusus untuk RSUD pemeriksaannya oleh tim PDTT. OPD lain hanya pemeriksaan LKP.

Jadi ada dua tim, ada LKPD dan ada Tim PDTT untuk di RSUP,” tegas Ervan.

DIREKTUR RSUD PROVINSI NTB SIAP DIAUDIT

Direktur Utama RSUD Provinsi NTB, dr. Lalu Herman Mahaputra, buka suara terkait adanya temuan kelebihan belanja Rp193 miliar tersebut.

Menurut dr. Jack, sapaan Direktur RSUD Provinsi NTB, kelebihan belanja tersebut bukan sepenuhnya kesalahan pembelanjaan. Namun, akibat sistem pengelolaan yang sudah berjalan.

Dalam sistem belanja di RSUD Provinsi NTB memungkinkan untuk meninggalkan utang. Sebab mekanismenya, melakukan belanja barang terlebih dulu baru kemudian pembayaran sesuai ketersediaan anggaran.

“Jadi kita itu belanja dulu, baru kita masukin perencanaannya. Misalnya, kita beli obat amoxilin 1.000 dan terpakai hanya 500. Nah, sisanya yang 500 itu dianggap berlebihan,” jelas dr. Jack, kemarin. Berdasarkan regulasi, ujarnya, mekanisme belanja seperti itu boleh. Pasalnya, barang yang pihaknya beli memang tersedia dan tidak fiktif.

BPK TURUN TANGAN PERIKSA TEMUAN KELEBIHAN BELANJA RP193 MILIAR DI RSUD NTB



GEDUNG LAYANAN RSUD PROVINSI NTB DI JALAN PRABU RANGKASARI, DASAN CERMEN, KECAMATAN SANDUBAYA, KOTA MATARAM. FOTO: MUHAMMAD YAMIN

“Kan obatnya memang ada, bukan mengada-ngada,” ujarnya.

Atas temuan itu, dr. Jack mengaku sangat siap apabila ada pemeriksaan. Tujuannya, supaya transparansi penggunaan anggaran lebih jelas.

“Saya pengen diaudit, senang saya, kenapa? Supaya Pemprov tahu kewajibannya untuk membayar ini. Tidak masalah itu, supaya kita tahu berapa seharusnya Pemprov mensubsidi anggaran untuk RSUD,” jelasnya.

Mantan Direktur RSUD Kota Mataram ini menegaskan, dalam APBD, alokasi anggaran untuk RSUD NTB hanya mencakup gaji pegawai.

“Itupun terbatas karena komposisi tenaga kerja di rumah sakit ini sepertiga adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS),” tuturnya.

Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan operasional, RSUD NTB harus mencari alternatif pembiayaan. Termasuk, belanja terlebih dahulu sebelum persetujuan anggaran.

“Bagaimana tidak berutang? Kami dikasih anggaran untuk bayar listrik hanya Rp600 juta per bulan, padahal kebutuhannya secara hitungan kami Rp1

miliar. Kalau kali 11 bulan, artinya ada kekurangan Rp 11,4 miliar,” jelasnya.

RSUD NTB juga memiliki utang karena masih ada klaim yang belum BPJS Kesehatan bayarkan, serta kewajiban cicilan ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Menyoal kritikan DPRD NTB, dr. Jack mengatakan, harusnya dewan memahami kelebihan belanja tersebut secara komprehensif, bukan hanya melihat angka utang tanpa mempertimbangkan kondisi operasional rumah sakit.

“Tidak ada masalah, makanya saya ketawa saja. Mungkin cara memahami kita berbeda. Kita sudah kasih catatan lengkap, sekarang tim kami sedang di Bappeda,” pungkaskan dr. Jack.

JADI SOROTAN DEWAN

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPRD NTB, Indra Jaya Usman alias IJU menyoroti membengkaknya belanja lewat tahun pada sejumlah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Khususnya pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB.

BPK TURUN TANGAN PERIKSA TEMUAN KELEBIHAN BELANJA RP193 MILIAR DI RSUD NTB



GEDUNG LAYANAN RSUD PROVINSI NTB DI JALAN PRABU RANGKASARI, DASAN CERMEN, KECAMATAN SANDUBAYA, KOTA MATARAM. FOTO: MUHAMMAD YAMIN

IJU membeberkan, terdapat kelebihan belanja 2024 yang rencana akan ditutup dengan alokasi APBD 2025 sekitar Rp193 miliar.

“Utang ini ditengarai kelebihan belanja. Sebab, tidak ada dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2024,” ungkapnya kepada media, Rabu, 12 Februari 2025.

Terhadap temuan itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat ini meminta, agar Inspektorat maupun melibat BPKP untuk melakukan pemeriksaan khusus.

“Jangan hanya audit untuk melegalkan sebagai utang, agar bisa dibayar dalam APBD. Ini seperti hal yang berulang,” tegas IJU.

IJU mengkhawatirkan, pembengkakan ini merupakan praktik fraud pengelolaan. Sebab, sebagian besar dari utang ini merupakan belanja obat-obatan dan barang medis habis pakai.

“Jenis barang ini kan kayak jin, karena sifatnya habis pakai. Mengauditnya saja sudah susah karena barangnya sudah tidak ada,” tuturnya.

Seharusnya, lanjut IJU, belanja seperti ini bisa terencana agar terkendali, sehingga tidak terus menerus menjadi utang. Pasalnya, pada tahun sebelumnya juga terjadi hal demikian.

Bahkan, jumlahnya terus membengkak dari hanya Rp38 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp193 miliar pada tahun 2024.

“Jangan-jangan ini seperti praktik PDAM yang setiap kelebihan neracanya ditutup dengan alasan pipa bocor tak terdeteksi,” bebarnya. (*)